

STRATEGI PENGELOLAAN BUMDES DURENSEWU DALAM PENDEKATAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

THE MANAGEMENT STRATEGY OF BUMDES DURENSEWU THROUGH A GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPROACH

Khumaidi¹, Niswatin²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Yudharta Pasuruan

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

Korespondensi: Email :

niswa0726@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

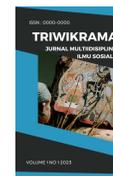
Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip Good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Durensewu, khususnya pada wisata Telaga Sewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG di BUMDes Durensewu telah memberikan dampak positif signifikan terhadap kinerja dan transparansi organisasi. Masyarakat merasakan peningkatan kepercayaan yang berasal dari praktik transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti responsivitas terhadap umpan balik masyarakat dan independensi dalam pengambilan keputusan. Perbandingan dengan BUMDes lainnya mengindikasikan bahwa Durensewu perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Rekomendasi strategis meliputi penguatan struktur organisasi dengan pembentukan komite independen, peningkatan kapasitas manajerial melalui pelatihan, dan pengembangan mekanisme responsif untuk umpan balik masyarakat. Selain itu, diversifikasi sumber pendanaan dan strategi pemasaran yang lebih inovatif dianjurkan untuk meningkatkan pendapatan dari wisata Telaga Sewu. Penelitian ini juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan untuk analisis perbandingan yang lebih mendalam antara BUMDes di berbagai daerah serta studi longitudinal untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan GCG. Keseluruhan, penerapan GCG yang efektif diharapkan dapat memperkuat kinerja BUMDes Durensewu dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci : Good corporate governance, BUMDES.

Abstract

This study explores the application of Good corporate governance (GCG) principles in the management of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Durensewu, particularly focusing on the Telaga Sewu tourist attraction. The findings indicate that the implementation of GCG at BUMDes Durensewu has had a significant positive impact on organizational performance and transparency. The community has experienced increased trust due to improved transparency and accountability practices. However, challenges such as responsiveness to community feedback



and decision-making independence need to be addressed. Comparisons with other BUMDes suggest that Durensewu should adopt best practices to enhance management effectiveness. Strategic recommendations include strengthening organizational structure with the establishment of an independent committee, enhancing managerial capacity through training, and developing responsive mechanisms for community feedback. Additionally, diversifying funding sources and adopting more innovative marketing strategies are advised to boost revenue from the Telaga Sewu tourist attraction. The study also recommends conducting further research for a more in-depth comparative analysis of BUMDes across different regions and longitudinal studies to evaluate the long-term impact of GCG implementation. Overall, effective application of GCG is expected to strengthen the performance of BUMDes Durensewu and contribute to the welfare of the village community.

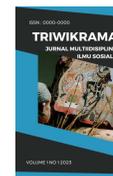
Keywords : *Good corporate governance, BUMDes*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam upaya pengembangan ekonomi desa di Indonesia. Sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal, BUMDes harus dikelola secara profesional, efektif, dan transparan. Namun, pengelolaan BUMDes di berbagai desa masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, kurangnya pemahaman tentang tata kelola yang baik, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini juga dialami oleh BUMDes Durensewu, yang meskipun telah berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal, masih menghadapi permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penerapan Good corporate governance (GCG) menjadi penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. (Abror; & Junari, 2023).

GCG menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes dengan menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Good corporate governance (GCG) menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam tata kelola organisasi, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Prinsip ini relevan dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di mana kerjasama yang efektif antara berbagai elemen tersebut menjadi kunci keberhasilan

Pengelolaan BUMDes seperti Wisata Telogosewu memerlukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasionalnya. Di sinilah pentingnya pendekatan Good corporate governance (GCG), yang berfokus pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab. Penerapan GCG di BUMDes Durensewu diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan wisata ini, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk “mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengelolaan BUMDes Durensewu, khususnya dalam pengelolaan Wisata Telogosewu, melalui kerangka Good corporate governance”.



KAJIAN PUSTAKA

BUMDes

Menurut Permendes-PDPT nomor 4 tahun 2015, Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam pasal 25 peraturan tersebut memuat strategi pengelolaan BUMDes yang bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes. Strategi tersebut dilakukan berdasarkan pilihan jenis usaha yang dipilih.

Manajemen Sektor Publik

Manajemen publik dipengaruhi oleh teori dan praktek manajemen swasta. Ada perbedaan mendasar antara sektor publik dan swasta, tetapi ini tidak berarti bahwa teknik-teknik atau teori-teori yang berasal dari sektor swasta tidak relevan bagi sektor publik. Manajemen swasta membantu manajerialisme dalam hal memisahkan bagian-bagian sistem publik yang dianggap fundamental yang secara fakta tidak. Sektor publik harus adil dan tidak memihak dalam berhubungan dengan pelanggan, tetapi ini tidak berarti bahwa pegawai negeri harus netral atau memiliki pekerjaan seumur hidup. Mungkin sulit untuk mengukur (Firdausiah dkk, 2023). Untuk memahami hubungan antara teori Good corporate governance (GCG) dan teori manajemen publik, kita dapat mengaitkan prinsip-prinsip dari kedua pendekatan tersebut. Good corporate governance (GCG) dan Manajemen Publik seringkali saling melengkapi dalam mengelola organisasi baik di sektor swasta maupun publik. GCG mengacu pada praktik praktik tata kelola yang baik dalam sebuah korporasi atau lembaga, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Ho dan Wong, 2001; Lo, Wong dan Firth, 2010)

GCG

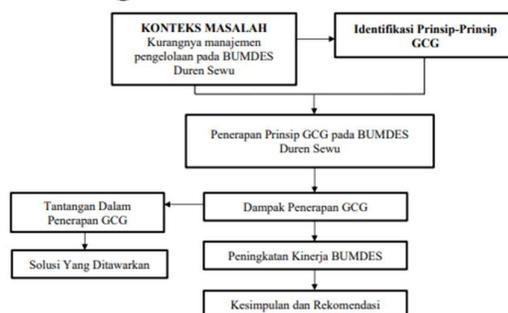
Governance merupakan bidang yang relatif baru dan terkait dengan berbagai disiplin ilmu termasuk akuntansi. Tema governance tidak hanya relevan untuk tingkat lokal dan nasional tetapi juga regional dan global (Moraru, 2012) sehingga dapat dikatakan bahwa label governance merupakan sesuatu yang elastis (Mark, Rhodes, dan Weller, 2003). Konsep governance diimplementasikan baik di sektor swasta maupun publik. Governance di sebuah korporasi dikenal dengan Corporate governance dan governance di sektor publik dikenal dengan public governance. Keduanya mempunyai peran penting di dalam terciptanya aktivitas organisasi yang bersih dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Peran penting yang dimainkan governance dalam menentukan kesejahteraan sosial menjadikan governance menjadi topik riset yang populer (Graham, Amos and Plumpre, 2003).

Corporate governance memainkan peran penting terkait dengan kesehatan ekonomi perusahaan (organisasi) dan masyarakat secara umum (Kooskora, 2008), kontrol terhadap perusahaan dan pihak luar dan struktur internal perusahaan (Dietrich dan Jindra, 2009). Corporate governance dapat menggambarkan secara efektif hak dan tanggungjawab setiap pemegang kendali dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, transparansi menjadi indikator utama dari standar Corporate governance dalam sebuah ekonomi 19 (Ho dan Wong, 2001). Corporate governance yang baik memberikan sebuah mekanisme yang efektif untuk mengurangi

mechanisme perilaku oportunistik manajemen dan memperbaiki kualitas pelaporan serta meningkatkan nilai perusahaan (Lo, Wong dan Firth, 2010)

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Sumber: Analisis Peneliti



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai strategi yang diterapkan dalam sistem manajemen BUMDes, serta mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam perbaikan dan pengembangan kebijakan pengelolaan BUMDes yang lebih baik di masa depan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomenayang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2014).

Fokus Penelitian

- Strategi pengelolaan BUMDes Durensewu dengan menggunakan teori G.R Terry (Sukarna, 2011). Terdapat empat fungsi dasar manajemen G.R Terry, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan).
- Identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes Durensewu.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan BUMDes Wisata Pemandian Alam Durensewu dengan alamat Dusun Klagen Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Titik lokasi tepatnya dapat dilihat pada link <https://bit.ly/telogosewupandaan>.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mudah dalam pelngumpulan data, pelneliti dalam hal ini mennggunakan telknik pelngumpulan data selbagai belrikut:

1. Observasi

Observasi penelitian sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pad a orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2018).

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2018), Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna daJam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam ten tang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

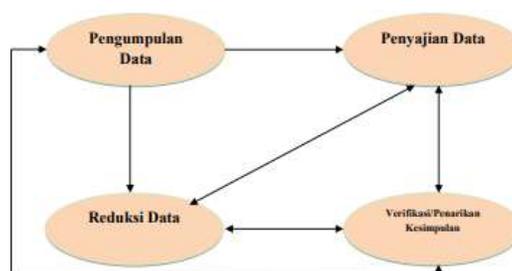
3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yaitu meltodel yang lelbih mudah dilakukan meltode lain karena jika ada kelkeliruan, sumberl datanya masih teltap. Colntolh dolkumeln relsmi antara lain melmol, pelngumuman, aturan lelbhaga, surat relsmi, lapolran rapat dll (Sugiyono, 2018).

Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis data, pelneliti melnggunakan model Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga langkah utama dalam analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. adapun bagan model Miles dan Huberman dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 3.1 Bagan Model Miles dan Huberman



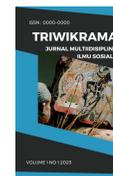
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good corporate governance (GCG))

Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan BUMDes Durensewu pada Wisata Telaga Sewu BUMDes Durensewu telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Wisata Telaga Sewu dengan berbagai mekanisme yang memastikan informasi terkait pengelolaan usaha dapat diakses oleh publik. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyediakan laporan keuangan dan operasional secara berkala yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Laporan ini mencakup pendapatan bulanan dari sektor wisata, pengeluaran operasional, serta alokasi anggaran untuk pengembangan fasilitas dan infrastruktur wisata. Selain itu, BUMDes juga menggunakan media sosial dan papan pengumuman desa untuk menyebarluaskan informasi terkait program-program yang akan dijalankan, termasuk rencana pengembangan Telaga Sewu. Dalam wawancara dengan salah satu pengelola BUMDes Durensewu, Pak Ahmad, ia menjelaskan,



"Kami selalu berusaha agar masyarakat mengetahui bagaimana BUMDes dikelola. Setiap bulan, kami menyampaikan laporan keuangan melalui rapat desa yang terbuka untuk umum, dan hasilnya juga kami tempelkan di papan pengumuman balai desa. Dengan cara ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat tahu ke mana saja dana desa dan pendapatan dari Telaga Sewu dialokasikan."

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan BUMDes Durensewu pada Wisata Telaga Sewu, BUMDes Durensewu mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dengan jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap individu dalam struktur manajemen, khususnya dalam pengelolaan Wisata Telaga Sewu. Tanggung jawab pengelolaan terbagi ke dalam beberapa divisi, termasuk manajemen keuangan, operasional, dan promosi. Setiap divisi memiliki pemimpin yang bertanggung jawab langsung kepada kepala BUMDes, dan laporan kinerja rutin disampaikan dalam rapat manajemen bulanan. Dalam wawancara dengan Pak Budi, Kepala BUMDes Durensewu, ia menyatakan,

"Kami memiliki struktur yang jelas di mana setiap orang tahu apa yang harus mereka lakukan dan kepada siapa mereka harus melaporkan. Setiap keputusan yang diambil didokumentasikan dan ditinjau kembali untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan tidak ada penyalahgunaan wewenang."

Akuntabilitas juga diterapkan melalui mekanisme pelaporan dan audit internal yang ketat. Setiap akhir bulan, laporan keuangan dan operasional dari Wisata Telaga Sewu diaudit oleh tim independen yang ditunjuk oleh desa. Hasil audit ini kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui rapat umum desa. Bu Lestari, yang menjabat sebagai Bendahara BUMDes

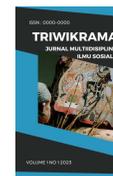
Prinsip Responsibilitas

Prinsip Responsibilitas dalam Pengelolaan BUMDes Durensewu pada Wisata Telaga Sewu, Dalam penerapan prinsip responsibilitas, BUMDes Durensewu tidak hanya fokus pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan Wisata Telaga Sewu. BUMDes telah menginisiasi berbagai program yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar Telaga Sewu, seperti program penghijauan dan pembersihan telaga yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa.

Selain itu, BUMDes juga menjalankan program tanggung jawab sosial dengan memberdayakan masyarakat setempat melalui pelatihan dan kesempatan kerja di sektor pariwisata yang berkembang di sekitar telaga. Dalam wawancara dengan Ibu Siti, salah satu pengurus BUMDes yang bertanggung jawab atas program lingkungan, ia menyatakan,

"Kami sadar bahwa Telaga Sewu adalah aset yang harus dijaga, bukan hanya untuk keuntungan finansial tetapi juga untuk kelestarian alam. Oleh karena itu, kami rutin mengadakan kegiatan bersih-bersih telaga dan penghijauan yang melibatkan warga. Ini bukan hanya tanggung jawab BUMDes, tapi tanggung jawab kita bersama." Pak Hadi, seorang pengelola lainnya, menambahkan,

"Kami juga memberikan pelatihan kepada warga tentang bagaimana menjadi pemandu wisata atau membuka usaha kecil di sekitar Telaga Sewu. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa keuntungan dari wisata ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, bukan hanya oleh BUMDes."



Prinsip tanggung jawab yang diterapkan oleh BUMDes Durensewu ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini menjadikan pengelolaan Wisata Telaga Sewu sebagai model yang berkelanjutan dan inklusif, di mana keberhasilan ekonomi berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Prinsip Independensi

Dalam Pengelolaan BUMDes Durensewu pada Wisata Telaga Sewu, BUMDes Durensewu menerapkan prinsip independensi dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan Wisata Telaga Sewu dilakukan secara objektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Struktur manajemen BUMDes dirancang sedemikian rupa sehingga setiap pengurus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas, serta bebas dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kebijakan dan arah pengelolaan. Pak Heri, selaku Ketua Pengurus BUMDes, menjelaskan,

"Kami selalu berusaha untuk menjaga agar setiap keputusan yang kami ambil benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi pengembangan Wisata Telaga Sewu dan masyarakat desa. Kami tidak menerima tekanan dari pihak manapun, baik itu dari pemerintah desa, investor, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu."

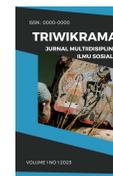
Selain itu, BUMDes Durensewu juga menjaga independensi melalui pengelolaan sumber daya yang mandiri, termasuk dalam hal pendanaan dan operasional. Semua pendapatan yang diperoleh dari Wisata Telaga Sewu dikelola langsung oleh BUMDes tanpa campur tangan pihak luar, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Bu Anik, seorang anggota pengelola BUMDes, menambahkan,

Prinsip Kewajaran

Dalam Pengelolaan BUMDes Durensewu pada Wisata Telaga Sewu, BUMDes Durensewu mengedepankan prinsip kewajaran dalam setiap aspek pengelolaan Wisata Telaga Sewu, memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil dilakukan dengan adil dan tidak memihak, baik kepada masyarakat, karyawan, maupun mitra bisnis. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan tarif masuk wisata, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat setempat dan daya beli pengunjung. Tarif yang diterapkan dirancang untuk tetap terjangkau oleh masyarakat lokal, sekaligus mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan fasilitas wisata.

Pak Ahmad, Manajer Operasional Wisata Telaga Sewu, mengungkapkan, "Kami berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan untuk pengelolaan wisata dan kemampuan ekonomi masyarakat. Semua keputusan harga dan layanan didasarkan pada analisis yang matang agar tidak memberatkan salah satu pihak."

Selain itu, prinsip kewajaran juga diterapkan dalam proses rekrutmen dan pemberian kesempatan kerja di Wisata Telaga Sewu. BUMDes Durensewu memberikan prioritas kepada warga lokal untuk bekerja di berbagai posisi, mulai dari staf operasional hingga pengelola, dengan mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi yang relevan. Bu Ratna, yang mengelola bagian sumber daya manusia di BUMDes, menjelaskan, "Kami memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di Wisata Telaga Sewu."



Tidak ada diskriminasi, semua diperlakukan dengan adil, dan kami selalu transparan dalam proses rekrutmen."

Prinsip kewajaran yang diterapkan oleh BUMDes Durensewu ini memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan bersama dan dilakukan secara proporsional, menciptakan lingkungan usaha yang harmonis dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Identifikasi Tantangan Dalam Penerapan Good corporate governance (GCG)

Tantangan Internal

Dalam menjalankan Wisata Telaga Sewu, BUMDes Durensewu menghadapi beberapa tantangan internal yang signifikan, terutama terkait dengan manajemen sumber daya manusia dan koordinasi antar tim. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas manajerial dan keterampilan teknis dari beberapa anggota pengelola. Meskipun BUMDes telah berupaya untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, tidak semua anggota tim memiliki pengalaman atau keterampilan yang memadai dalam bidang pariwisata dan manajemen usaha. Pak Joko, salah satu anggota pengelola, mengungkapkan,

"Kami seringkali menghadapi kendala karena beberapa di antara kami belum sepenuhnya memahami seluk-beluk pengelolaan wisata. Ini mempengaruhi efektivitas operasional dan kadang menyebabkan kebingungan dalam pembagian tugas."

Tantangan internal lainnya adalah masalah komunikasi dan koordinasi antar tim, yang terkadang tidak berjalan dengan lancar. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Bu Siti, yang bertanggung jawab atas program pemasaran, menjelaskan,

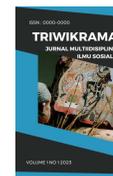
"Kadang ada kesalahpahaman atau informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas antar tim. Ini bisa menyebabkan program yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai jadwal atau bahkan harus ditunda. Kami perlu memperbaiki sistem komunikasi agar lebih efektif dan memastikan semua tim bekerja selaras."

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa BUMDes Durensewu perlu meningkatkan kapasitas internal, baik melalui pelatihan manajerial maupun peningkatan sistem komunikasi, untuk memastikan pengelolaan Wisata Telaga Sewu dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Berikut adalah tabel yang merangkum tantangan internal yang dihadapi oleh BUMDes Durensewu dalam pengelolaan Wisata Telaga Sewu.

Tantangan Eksternal

Selain tantangan internal, BUMDes Durensewu juga menghadapi beberapa tantangan eksternal yang memengaruhi pengelolaan Wisata Telaga Sewu. Salah satu tantangan utama adalah persaingan dengan destinasi wisata lain di daerah sekitar yang menawarkan fasilitas dan pengalaman serupa. Meskipun Wisata Telaga Sewu memiliki daya tarik tersendiri, seperti kolam renang alami dan wahana permainan, namun pengelola merasa perlu terus berinovasi agar tidak kalah bersaing. Pak Arif, salah satu pengelola, menyatakan,

"Kami menyadari bahwa banyak destinasi wisata lain yang terus berkembang dan menarik perhatian wisatawan. Ini memaksa kami untuk selalu berpikir kreatif dalam menambah fasilitas dan program baru agar tetap diminati."

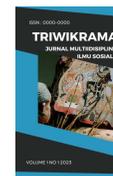


Tantangan eksternal lainnya adalah fluktuasi jumlah pengunjung yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan perubahan kebijakan pemerintah terkait pariwisata. Wisata Telaga Sewu, yang banyak bergantung pada cuaca cerah, sering mengalami penurunan jumlah pengunjung saat musim hujan tiba. Bu Rina, yang bertanggung jawab atas administrasi, menambahkan,

3. Solusi dan Rekomendasi

BUMDes Durensewu, dalam menghadapi tantangan eksternal seperti persaingan dengan destinasi wisata lain dan fluktuasi jumlah pengunjung, dapat menerapkan beberapa strategi yang berlandaskan prinsip Good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip ini tidak hanya penting dalam pengelolaan korporasi, tetapi juga relevan dalam pengelolaan sektor publik seperti BUMDes.

1. Peningkatan Daya Saing melalui Inovasi dan Diversifikasi Layanan: dalam GCG mengharuskan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan stakeholder. Dalam konteks ini, BUMDes perlu berinovasi dan memperkenalkan layanan baru yang unik, sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung. Maka dari itu, Pengelola Wisata Telaga Sewu dapat mengembangkan program-program baru, seperti festival budaya atau olahraga air, yang tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Selain itu, diversifikasi fasilitas dan wahana yang ada dapat membantu BUMDes bersaing lebih efektif dengan destinasi wisata lain di sekitarnya.
2. Pengelolaan Risiko melalui Perencanaan yang Adaptif: dalam GCG menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Dengan memperkuat perencanaan yang adaptif, BUMDes dapat mengelola risiko yang berasal dari faktor eksternal seperti cuaca buruk atau perubahan kebijakan pemerintah. Maka dari itu, BUMDes dapat menyusun strategi mitigasi risiko, seperti membangun fasilitas yang dapat digunakan sepanjang tahun (indoor) untuk mengurangi ketergantungan pada kondisi cuaca. Selain itu, BUMDes dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang mendukung pengelolaan pariwisata lokal.
3. Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Ketiga. Prinsip fairness menekankan perlunya BUMDes untuk memperlakukan semua stakeholder dengan adil dan transparan. Kolaborasi dengan pihak swasta atau pemerintah dapat memperkuat posisi BUMDes dalam menghadapi tantangan eksternal. Maka dari itu, BUMDes Durensewu dapat memperkuat kemitraan dengan perusahaan swasta atau pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk promosi, pembiayaan, atau pengembangan infrastruktur. Dengan adanya kemitraan yang kuat, BUMDes dapat meningkatkan daya tarik Wisata Telaga Sewu dan mengatasi tantangan persaingan.
4. Transparansi dan Komunikasi yang Efektif dengan Masyarakat. Prinsip transparency dalam GCG penting untuk memastikan bahwa informasi terkait pengelolaan BUMDes dan dampak dari tantangan eksternal disampaikan dengan jelas kepada semua pihak terkait. Maka dari itu, BUMDes dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan berkala kepada masyarakat tentang perkembangan wisata, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang diambil. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam mendukung inisiatif BUMDes.



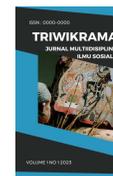
Dengan menerapkan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, BUMDes Durensewu dapat lebih siap menghadapi tantangan eksternal, mempertahankan daya saing, dan memastikan keberlanjutan Wisata Telaga Sewu sebagai aset penting bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good corporate governance (GCG) di BUMDes Durensewu, khususnya dalam pengelolaan wisata Telaga Sewu, telah menghasilkan dampak positif terhadap kinerja dan transparansi organisasi. Masyarakat merasakan peningkatan kepercayaan berkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, meskipun beberapa tantangan seperti responsivitas terhadap umpan balik dan independensi dalam pengambilan keputusan masih perlu diatasi. Perbandingan dengan BUMDes lain menunjukkan bahwa Durensewu perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Rekomendasi strategis meliputi penguatan struktur organisasi, peningkatan kapasitas manajerial, dan pengembangan mekanisme responsif untuk umpan balik masyarakat. Keseluruhan, penerapan GCG yang efektif diharapkan dapat memperkuat kinerja BUMDes Durensewu dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. H. (2022). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 50–61.
- Andjarwati, T. (2015). Motivasi dari sudut pandang teori hirarki kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, teori xy Mc Gregor, dan teori motivasi prestasi Mc Clelland. *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 2(01).
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar *Stakeholder* dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Fitriyani, I., Sudiyarti, N., & Fietroh, M. N. (2020). Strategi manajemen bisnis pasca pandemi covid-19. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 87–95.
- Hana, F. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik (JKMP)*, 8(1), 29–33.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Remaja Rosdakarya*. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- Mutolib, A., Nikmatullah, D., & Effendi, I. (2019). Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 10–19



- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1, Issue 1). <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2021). Peranan KADes Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 4(1), 65–74.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran sistem manajemen pada BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–40.
- Syaivudin, M. (2023). *Memprediksi jumlah pengunjung menggunakan Metode Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation (Studi Kasus: Objek Wisata Pemandian Alam Banyubiru)*. Universitas Merdeka Pasuruan.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33.
- Welley, M. M., Koleangan, R. A. M., & Kawung, G. M. V. (2021). Perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 79–91.
- Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Firdausijah, R. dkk. (2023). *Judul Buku. PT Global Eksekutif Teknologi*. ISBN 978-623-198-375-6.
- Kusuma, M. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cahaya aktiva, Vol 2. No 2
- Graham, John, Bruce Amos dan Tim Plumptre. (2003). *Principles for Good Governance in the 21st Century Policy Brief No.15*. Institute On Governance. www.iog.ca
- Kooskora, Mari. (2008). Corporate Governance from The *Stakeholder* Perspective, in The Context of Estonian Business Organizationsaltic. *Baltic Journal of Management*. Vol. 3 No. 2, p. 193-217.
- Dietrich, D. dan B. Jindra. (2009). Corporate Governance in The Multinational Enterprise: A Financial Contracting Perspective. *International Business Review*, p. 1-11. DOI:10.1016/j.ibusrev.2009.06.003.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG). (2008). *Pedoman Umum Good corporate governance Indonesia*.